

MENUJU PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELESTARIAN

Gede Sedana

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra, Denpasar
gedesedana@gmail.com

Abstrak

Program pengentasan kemiskinan harus dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu tujuan dari millennium development goals. Sektor pertanian di Indonesia diidentikan dengan kemiskinan sehingga diperlukan adanya pendekatan pembangunan yang pro-pertanian melalui pembangunan pertanian berkelestarian yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu sosial, ekonomis dan lingkungan. Salah satu alternatif yang perlu diterapkan adalah pendekatan agribisnis guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Pendekatan agribisnis berbentuk pertanian yang modern, tangguh dan profesional dengan mengintegrasikan seluruh subsistem dalam agribisnis. Pemerintah agar menciptakan iklim perekonomian yang kondusif untuk mendorong setiap sektor berperan dalam memajukan pertanian, dan tidak memunculkan ego-sektoral. Sektor pertanian harus dipandang sebagai lokomotif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli keluarga petani. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian berkelestarian dapat menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Kata kunci: Kemiskinan, pertanian, agribisnis, pembangunan, berkelestarian

Abstract

The poverty alleviation program must be carried out by the government as one of the objectives of the millennium development goals. The agricultural sector in Indonesia is identified with poverty, so a pro-agriculture development approach is needed through the sustainable agriculture development which consists of three main components, namely social, economic and environmental aspects. One alternative that needs to be applied is the agribusiness approach to realize the improvement of the welfare of farm families. An agribusiness approach in the form of agriculture that is modern, resilient and professional by integrating all subsystems in agribusiness. The government should create a conducive economic climate to encourage each sector to play a role in advancing agriculture, and not to bring about ego-sectoral. The agricultural sector must be seen as a locomotive of development to improve the welfare and purchasing power of farm families. Therefore, the development of sustainable agriculture can reduce poverty in rural areas.

Keywords: Poverty, agriculture, agribusiness, development, sustainability

PENDAHULUAN

Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*millenium development goals*) adalah *no poverty* (Wieser, 2011; Keho, 2017). Kondisi ini perlu diatasi karena sekitar 10 % dari penduduk dunia terkategori sangat miskin dimana mereka sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, kesehatan, pendidikan termasuk sanitasi air bersih (Yoshino, *et al.* 2017; Inoue, T., & Hamori, S. 2012; Shahbaz, 2009). Kemiskinan dapat diapndang sebagai suatu ketidakmampuan seseorang didalam pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga standar tingkat hidupnya sangat rendah. Sebagian besar dari mereka yang miskin tersebut bertempat tinggal di daerah pedesaan karena adanya berbagai keterbatasan sumber daya dan akses termasuk kegagalan pasar yang berpengaruh terhadap kemiskinannya (Adji, and Rachmad, 2017; Jalilian & Kirkpatrick, 2002; Jalilian & Kirkpatrick, 2005; Odhiambo, 2009; Rajan & Zingales, 2001). Kemiskinan penduduk menjadi suatu masalah dan sekaligus tantangan yang besar bagi negara-negara yang sedang berkembang (Mfusi, and Govender. 2015). Beberapa dampak atau amasalah yang dapat ditimbulkan karena kemiskinan tersebut

adalah munculnya kriminalitas, meningkatnya angka kematian di masyarakat, tertutupnya akses pendidikan formal, tingginya tingkat pengangguran, dan memunculkan adanya konflik di tengah-tengah masyarakat.

Kemiskinan yang ada di Indonesia sering diidentikan dengan kondisi masyarakat di pertanian di perdesaan. Sepertinya sangat ironis kondisi ini terjadi karena Negara Indonesia merupakan Negara agraris. Penduduk di wilayah perdesaan khususnya di negara-negara yang sedang berkembang masih bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas. Kegiatan pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di kawasan perdesaan (Abidin, *et al.* 2013). Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya harus semakin serius, khususnya melalui pembangunan pertanian. Sektor pertanian perlu diperkuat guna tetap memberikan peran yang strategis, terutama di dalam penyediaan pangan, penciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, pengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh industri (sarana produksi dan alat serta mesin pertanian), penyediaan bahan baku untuk industri, dan bahkan penyumbang devisa bagi negara. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pertanian yang berkelanjutan, dan upaya untuk membangun pertanian dalam mengentaskan kemiskinan.

MEMBANGUN PERTANIAN BERKELESTARIAN

Pembangunan pertanian sangat membutuhkan ketersediaan sumber daya alam yang berkecukupan dan berkualitas guna dapat dikelola untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menjadi salah satu tekanan terhadap penyediaan pangan karena luas lahan tidak terus berkembang dan bahkan sebaliknya semakin berkurang. Pemanfaatan teknologi baru seperti revolusi hijau telah berhasil memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas khususnya tanaman padi. Namun, penerapan teknologi ini telah memberikan dampak yang negatif juga terutama pada lingkungan, tanah dan air serta ekosistem di dalam dan sekitar lahan sawah. Peningkatan produksi dari aspek ekonomis memberikan dampak yang positif bagi petani dan juga pemerintah serta pihak swasta, namun tidak memberikan kelestarian terhadap pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam. Atau dengan kata lain, pengelolaan sumber daya alam (lahan sawah) potensial yang mengutamakan keuntungan ekonomis sesaat memberikan dampak terhadap menurunnya potensial sumber daya alam tersebut dan secara perlahan dapat mengurangi manfaatnya di masa mendatang. Apalagi, para petani belum memiliki sikap dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan usaha-usaha konservasi sumber daya alamnya. Konservasi lahan dan air sering terabaikan di dalam pengelolaan usahatani yang berorientasi pada keuntungan semata sehingga terjadi degradasi kualitas lahan pertanian (Abdurachman, 2008; Wihardjaka, 2018). Aspek lingkungan yang dinegasikan akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanah dan tanaman sehingga pembangunan pertanian tidak bisa dijamin kelestariannya.

Dalam meningkatkan pembangunan di tingkat regional, prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelestarian atau berkelanjutan termasuk pembangunan pertanian harus dipahami secara komprehensif, yaitu sedikitnya mencakup dimensi sosial (budaya), ekonomi dan lingkungan (Rivai dan Anugrah. 2011). Ketiga dimensi tersebut harus dijalin

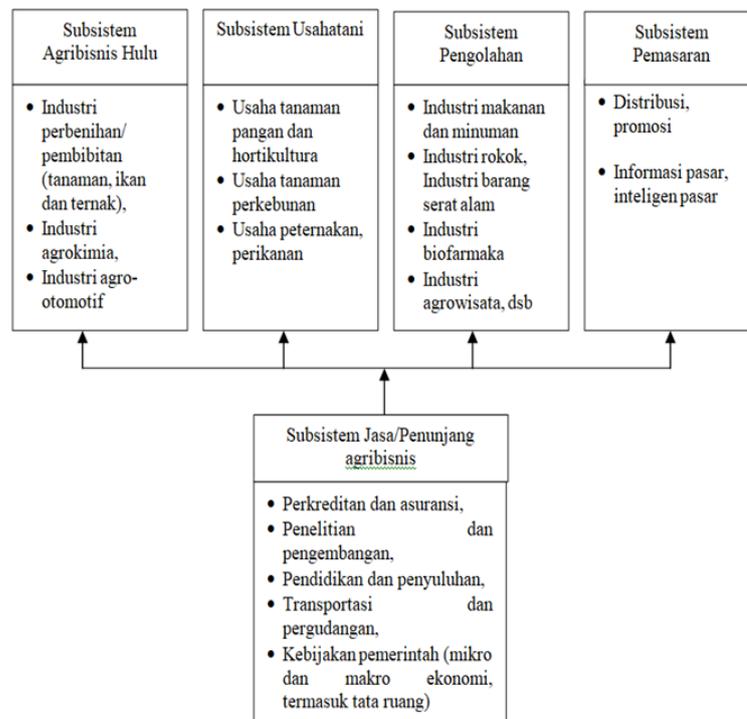
keterkaitannya sehingga menjadi pilar dasar di dalam mewujudkan pembangunan berkelestarian. Pembangunan pertanian berkelestarian ini merupakan pertanian alternatif yang didasarkan pada perlindungan sumberdaya alam (lingkungan) dan kualitas kehidupan di wilayah pedesaan sebagai basisnya kegiatan pertanian. Oleh karena itu, tujuan penerapan pertanian berkelestarian adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman, meningkatkan tingkat pendapatan petani dan keluarganya serta menjaga kestabilan kehidupan interaksi sosial di dalam masyarakat.

Pembangunan pertanian hakekatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman selain ternak dan ikan guna menaikkan pendapatan keluarga petani melalui berbagai upaya baik dari internal maupun eksternal petani (Sudalmi, 2010). Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen pertanian secara modern dan profesional serta didukung oleh inovasi baik dari aspek teknis maupun non-teknis.

MEMBANGUN PERTANIAN UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Modernisasi pertanian tidak hanya difokuskan pada aspek produksi, tetapi menyangkut kegiatan off-farm baik di tingkat hulu maupun di hilir yang melibatkan sektor non-pertanian, seperti industri dan sektor-sektor lainnya. Perwujudan modernisasi pertanian merupakan bagian dari penerapan prinsip sistem agribisnis yang memiliki basis ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan prasarana dan sarana bisnis pertanian, serta modal untuk kegiatan usahatani dan industri pertanian. Pertanian yang berorientasi pasar mencakup berbagai pra-produksi, produksi dan pasca-produksi serta aspek pendukung yang menjadi subsistem-subsistem dalam agribisnis (lihat Gambar 1).

Gambar 1
Sistem agribisnis

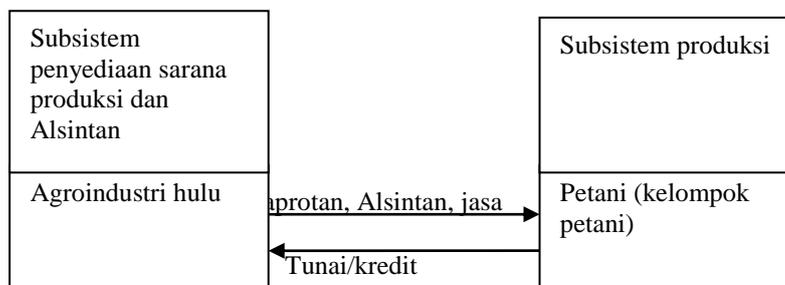


Berjalannya fungsi-fungsi dalam setiap subsistem agribisnis secara baik memberikan jaminan terwujudnya pertanian inklusif yang selanjutnya mendorong pembangunan yang berkelestarian. Membangun pertanian dengan sistem agribisnis yang berbasis pada sumber daya alam lokal (lahan dan produk) dan mengintegrasikan dengan kebutuhan pasar akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, pengembangan sistem agribisnis dapat diarahkan untuk mengatasi kemiskinan perdesaan. Pada subsistem penyediaan sarana produksi dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sangat dibutuhkan adanya pengembangan agroindustri hulu yang menyediakan kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan benih dan bibit yang berkualitas, berbagai jenis pupuk yang tersedia dalam aspek waktu, jumlah dan kualitasnya. Penggunaan sarana produksi pertanian ini agar memperhatikan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan, misalnya pertanian organik. Selain itu, alat dan mesin pertanian agar dapat disediakan secara lokal atau mudah diakses oleh para petani/kelompok petani. Berkenaan dengan penyediaan alat dan mesin pertanian ini, sangat diperlukan adanya layanan jasa terhadap pengelolaannya (penggunaan, operasi dan perbaikan). Layanan jasa tersebut memiliki fungsi untuk memberikan asistensi teknik atau cara penggunaan alat dan mesin, manfaat alat dan mesin pertanian, serta pemeliharaan dan perbaikannya. Ini berarti bahwa kesempatan berusaha dan bekerja bagi warga masyarakat menjadi semakin terbuka sehingga pengembangan pertanian agribisnis sekaligus dapat menyerap tenaga kerja lokal. Atau dengan kata lain, tingkat pengangguran di dalam suatu wilayah dapat dikurangi seiring dengan pengembangan agroindustri yang memproduksi sarana produksi dan alat serta mesin pertanian. Dampak positif berikutnya dengan pengembangan agroindustri ini juga adalah adanya peningkatan kebutuhan sarana lainnya, seperti sarana transportasi.

Pada subsistem produksi (tanaman dan hewan termasuk ternak) merupakan inti dari kegiatan pertanian (on-farm). Subsistem ini erat kaitannya dengan agroindustri hulu yang menghasilkan sarana produksi, alat dan mesin pertanian. Sarana produksi tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian melalui penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*. Sistem budidaya yang baik diarahkan untuk menghasilkan produktivitas dan kualitas produk yang semakin meningkat. Persiapan pembenihan, pembibitan dan nursery menjadi bagian yang penting di dalam subsistem produksi ini. Oleh karena itu, para petani wajib diberikan penyuluhan dan pelatihan tentang GAP tersebut sehingga kapasitas teknis (pertanian dan irigasi) mereka semakin baik untuk berusahatani secara efisien dan efektif. Para penyuluh baik dari institusi pemerintah dan swasta yang memiliki kompetensi pada komoditas tertentu sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tersebut.

Selain itu, pihak pengelola agroindustri hulu memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan kapasitas para petani sesuai dengan produk-produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh para petani. Dengan demikian, saling ketergantungan di antara para petani yang melakukan aktivitas produksi dengan penyedia sarana produksi dan alat serta mesin pertanian dapat dibangun dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan. Aliran barang dan jasa dari pihak agroindustri ke petani (kelompok petani) akan dibarengi aliran uang (tunai atau kredit) dari petani (kelompok petani), seperti terlihat pada Gambar 2.

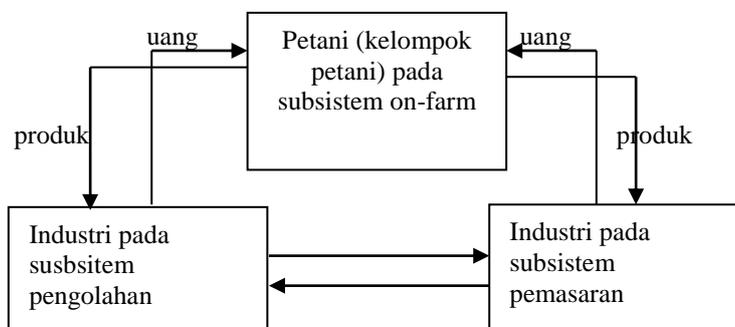
Gambar 2
Keterkaitan antara agroindustri hulu dengan petani (kelompok petani)



Dari sisi ekonomis, keterkaitan di antara kedua pihak memberikan keuntungan yang bermuara pada peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, sehingga keberlanjutan hubungan mereka dapat terjamin. Subsistem penunjang juga memberikan kontribusi peranan di dalam terbangunnya keterkaitan di antara kedua subsistem tersebut. Penunjang tersebut di antaranya adalah penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, penyediaan dan pengelolaan irigasi dari Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyediaan modal usahatani dari pihak lembaga keuangan (bank), dukungan transportasi dari Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, pertautan mutualisme juga terlihat pada subsistem produksi (on-farm) dengan subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran. Petani (kelompok petani) yang telah menghasilkan produk dalam jumlah dan kualitas tertentu memiliki hubungan dengan agroindustri hilir (industri pengolahan) termasuk industri jasa pemasaran, seperti terlihat pada Gambar 3.

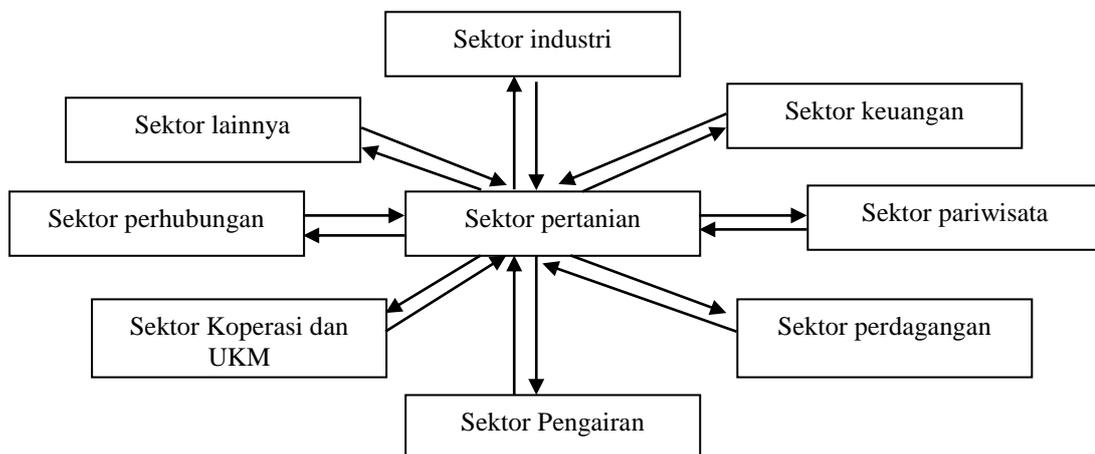
Gambar 3
Keterkaitan antara petani (kelompok petani) pada subsistem produksi dengan subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran



Keterkaitan yang ditunjukkan pada Gambar 3 memberikan informasi bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh petani (kelompok petani) dibutuhkan oleh pihak industri baik pengolahan maupun pemasaran. Demikian pula sebaliknya petani dan kelompok petan membutuhkan pihak-pihak tersebut untuk mendapatkan penerimaan dari produk-produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu, subsistem-subsitem tersebut agar dapat terjalin semakin kuat dan semakin memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Tingkat keuntungan ini merupakan insentif bagi pihak petani untuk meningkatkan produksinya (kuantitas dan kualitas). Di sisi lain, pihak industri pengolahan dan pemasaran juga dapat untuk semakin mdeningkatkan kapasitasnya. Sub-sistem penunjang juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi sub-sistem pengolahan dan pemasaran, seperti dalam penyediaan kredit, transportasi, komunikasi dan lain sebagainya.

Salah satu komponen yang sangat dibutuhkan dalam subsistem penunjang adalah perbaikan kelembagaan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan petani. Integrasi dan sinergi kebijakan dari berbagai sektor agar dimuarakan pada sektor pertanian guna mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan pertanian berorientasi agribisnis. Dengan demikian, pemerintah perlu mengambil prinsip pembangunan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan yang diawali dari pelaku-pelaku pertanian dalam arti luas (petani, nelayan dan peternak). Pembangunan sektor pertanian harus “dikeroyok” oleh berbagai sektor lainnya jika benar-benar ingin mewujudkan pertanian yang modern dan tangguh serta professional (lihat Gambar 4).

Gambar 4
Sektor-sektor yang sangat dibutuhkan dalam membangun pertanian



Pertanian yang modern, tangguh dan profesional memerlukan adanya iklim perekonomian yang kondusif untuk keseluruhan sektor yang terlibat di dalamnya. Kondusifnya iklim perekonomian akan mendorong setiap sektor untuk berperan di dalam kegiatan memajukan pertanian, dan sekaligus menghindarkan adanya ego-sektoral. Misalnya, dalam pengembangan industrialisasi dalam pembangunan agroindustri di

perdesaan agar dipersiapkan berbagai kebijakan yang mendukungnya, seperti perijinan, tata ruang, finansial, sumber daya manusia, transportasi, komunikasi dan lain sebagainya. Investasi untuk membangun industri perdesaan agar didorong untuk mampu mengubah mindset masyarakat terhadap perubahan teknologi dan inovasi serta memberikan nilai tambah yang proporsional di antara para pelaku ekonomi di perdesaan. Usaha pertanian berorientasi pada permintaan pasar yang didasarkan pada sumber daya alamnya juga membutuhkan adanya kesiapan adaptasi bagi masyarakat petani untuk memproduksi produk-produk yang memiliki permintaan tinggi dan disertai nilai tambah. Oleh karena itu, pembangunan industri perdesaan ini dapat menjadi magnet bagi sektor-sektor lain untuk semakin berkontribusi dan berperan di dalam membangun pertanian dan perdesaan.

Kebijakan penganggaran yang berpihak kepada sektor pertanian dan pendukung pertanian perlu diambil oleh pemerintah guna mempercepat terbangunnya pertanian yang modern, tangguh dan profesional. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan di perdesaan perlu diambil untuk memberikan jaminan adanya peningkatan nilai tambah di tingkat petani. Penentuan komoditas unggulan agar diawali dengan indentifikasi dan studi penentuan jenis komoditas yang dapat diusahakan secara teknis budidaya berdasarkan kondisi agroklimatnya dan memiliki permintaan yang tinggi di masyarakat. Selain itu, kebijakan fasilitasi untuk terbangunnya kemitraan usaha antara kelompok petani dengan pihak-pihak lain agar diciptakan dan memberikan keuntungan ekonomis bagi berbagai pihak. Pemerintah agar memiliki asumsi bahwa kemajuan sektor pertanian, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan pelaku pertanian lainnya akan memicu pertumbuhan ekonomi di tingkat perdesaan, kabuapten, provinsi dan bahkan di tingkat nasional. Sektor pertanian akan menjadi lokomotif pembangunan, dimana sektor-sektor lain akan ikut terdorong dan tertarik secara positif dan signifikan jika sektor pertanian semakin tumbuh maju. Daya beli keluarga petani yang semakin tinggi dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertukaran barang dan jasa serta uang di masyarakat bila kesejahteraan mereka semakin ditingkatkan. Ini berarti bahwa tingkat kemiskinan di kalangan keluarga petani akan dapat dientaskan melalui penguatan integritas dan sinergitas pembangunan yang mendukung pertanian berorientasi agribisnis.

PENUTUP

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari *millennium development goals*. Di Indonesia, sebagian besar penduduk miskin berada pada sektor pertanian karena adanya keterbatasan baik internal maupun eksternal. Diperlukan adanya pendekatan pembangunan pertanian yang berkelestarian yang mencakup aspek sosial, ekonomis dan lingkungan. Pendekatan agribisnis menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Melalui pendekatan ini akan dapat diwujudkan pertanian yang modern, tangguh dan professional sepanjang seluruh subsistem dalam agribisnis saling berkontribusi secara signifikan. Sangat diperlukan adanya iklim perekonomian yang kondusif agar setiap sektor untuk berperan untuk memajukan pertanian, dan sekaligus menghindarkan adanya ego-sektoral. Agar disadari bahwa sektor pertanian harus dijadikan lokomotif pembangunan untuk mendorong dan menarik sektor-sektor lainnya. Peningkatan kesejahteraan keluarga petani akan memperkuat daya beli mereka dan

dapat mempercepat pertukaran barang dan jasa serta uang di masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan di sektor pertanian akan dapat diatasi melalui penguatan integritas dan sinergitas pembangunan yang mendukung pertanian berorientasi agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., R. Octaviani, dan F.T. Nasdian. 2013. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian di Kabupaten Bogor, Studi Kasus di Kecamatan Pemijahan Dan Leuwiliang. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Volume 5 Nomor 2: 76-91.
- Adji, A, and S. H. Rachmad. 2017. *Indonesia Poverty Reduction Strategies: Shifting policies to promote employment in the poorest four deciles. Economics and Finance in Indonesia*. Vol. 63 No. 1: 13–37.
- Abdurachman, A. A. Dariah, dan A. Mulyani. 2008. Strategi dan Teknologi Pengelolaan lahan Kering Mendukung Pengadaan pangan Nasional. *Jurnal Litabng Pertanian*, 27 (2): 43-49.
- Inoue, T., & Hamori, S. 2012. *How has financial deepening affected poverty reduction in India? empirical analysis using state-level panel data. Applied Financial Economics*, 22(5), 395-408.
- Jalilian, H., & Kirkpatrick, C. 2002. *Financial development and poverty reduction in developing countries. International Journal of Finance and Economics*, 7(2), 97-108.
- _____. 2005. *Does financial development contribute to poverty reduction? The Journal of Development Studies*, 41(4), 636-656.
- Keho. Y. 2017. *Financial Development and Poverty Reduction: Evidence from Selected African Countries. International Journal of Financial Research*, Vol. 8. No.4: 90-98.
- Mfusi, Z.E. and K.K. Govender. 2015. *Alleviating Poverty in South Africa – A Theoretical Overview of the Expanded Public Works Program. Journal of Economics*, Vol.6, Issue 2: 118-127.
- Odhiambo, N. M. 2009. *Finance–growth–poverty nexus in South Africa: a dynamic causality linkages. Journal of Socio-Economics*, 38, 320-325.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. 2001. *The great reversals: the politics of financial development in the 20th century. NBER Working Paper 8178*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Rivai, R.S. dan I. S. Anugrah. 2011. Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 29 No. 1: 13 – 25.
- Shahbaz, M. 2009. *Financial performance and earnings of poor people: a case study of Pakistan. Journal of Yasar University*, 4, 2557-2572.
- Sudalmi, E.S. 2010. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *INNOFARM : Jurnal Inovasi Pertanian* Vol.9, No. 2: 15 -28.
- Wieser, C. 2011. *Determinants of the Growth Elasticity of Poverty Reduction. Why the Impact on Poverty Reduction is Large in Some Developing Countries and Small in Others*. WIFO Working Papers 406.
- Wihardjaka, A. 2018. Penerapan Model Pertanian Ramah Lingkungan sebagai Jaminan Perbaikan Kuantitas dan Kualitas Hasil Tanaman Pangan. *Pangan* Vo.27, No.2: 155-164.
- Yoshino, N. and T. Hesary, Farhad & O. Miyu, 2017. *International Remittances and Poverty Reduction: Evidence from Asian Developing Countries. ADBI Working Papers 759*, Asian Development Bank Institute.